Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi
Volume XVII, No. 2 (Oktober 2023): 99-106 ISSN: 1978-1180

Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Laporan Realisasi Anggaran

*Penina Agnesia Bili[1], Susi Siswati[2]

[1,2] Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta

*Corresponding Email: penina.a2022@student.ukrimuniversity.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Education, Youth and Sports Office of Yogyakarta Special Region Province using the Work Unit Revenue and Expenditure Budget Realization Report. The analysis carried out includes revenue variance analysis, revenue growth ratio, expenditure variance analysis, expenditure growth ratio and expenditure compatibility ratio. The results of this study indicate that financial performance seen from the analysis of revenue variance for the 2017-2021 period can be said to be good. Revenue growth is said to be very good because it is dominated by positive growth. Analysis of expenditure variances for the 2017-2021 period shows that financial performance has been said to be very good because the realization of expenditure set does not exceed the expenditure budget. Expenditure growth is said to be increasing because the results of the analysis in 2017-2019 and 2021 are positive. Based on the expenditure compatibility ratio, it can be seen that operating expenditure still dominates total work unit expenditure when compared to capital expenditure.

Keywords: Financial Performance, Budget Realization Report, Analysis of Revenue and Expenditure Budget Realization

---

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja. Analisis yang dilakukan meliputi analisis varians pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, analisis varians belanja, rasio pertumbuhan belanja dan rasio keserasian belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari analisis varians pendapatan periode tahun 2017-2021 sudah dapat dikatakan baik. Pertumbuhan pendapatan dikatakan sangat baik karena didominasi dengan pertumbuhan bernilai positif. Analisis varians belanja periode tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa kinerja keuangan sudah dikatakan sangat baik karena realisasi belanja yang ditetapkan tidak melebihi anggaran belanja. Pertumbuhan belanja dikatakan naik karena hasil analisis pada tahun 2017-2019 dan 2021 bernilai positif. Berdasarkan rasio keserasian belanja, terlihat bahwa belanja operasi masih mendominasi total belanja satuan kerja jika dibandingkan dengan

© 2023 Penina Agnesia Bili, Susi Siswati.

belanja modal.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan merupakan proses yang penting bagi sebuah entitas. Pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan dan satuan kerjanya, laporan keuangan memungkinkan penggunanya untuk dapat membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Disamping itu, melalui data-data yang terdapat dalam laporan keuangan, pengguna laporan keuangan dapat menilai kondisi keuangan daerah, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, menilai ketaatan suatu entitas terhadap peraturan perundang-undangan, serta menilai kinerja suatu entitas.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan derajat ketercapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah selama satu periode anggaran (Marselina *et al.*, 2023). Saat ini, kinerja instansi pemerintahan menjadi perhatian bagi khalayak, sebab berbagai fenomena menyiratkan bahwa instansi pemerintah sering melakukan pemborosan, bahkan mengalami kerugian (Widianti *et al.*, 2022). Untuk itu, pengukuran kinerja yang objektif, transparan, dan akuntabel menjadi tuntutan masyarakat. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan (Suhaedi, 2019). Penilaian akuntabilitas tidak terbatas pada aspek penyerapan dan penggunaan anggaran, namun juga terkait dengan ketepatan sasaran penggunaan dana, pengalokasian anggaran yang efektif, efisien, serta ekonomis (Marselina *et al.*, 2023).

Salah satu dokumen yang memuat data-data untuk melakukan pengukuran kinerja adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LRA merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pengukuran kinerja melalui LRA dapat dilakukan dengan membentuk rasio keuangan dari pos-pos yang terdapat pada LRA.

Pengukuran dan analisis kinerja keuangan pada institusi pemerintahan menjadi topik yang cukup sering diteliti, baik di tingkat pemerintah provinsi, kota/kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun desa. Penelitian terdahulu yang menganalisis kinerja keuangan SKPD dilakukan oleh beberapa peneliti. Patih *et al.* (2022) melakukan penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum kinerja belanja dinas terkait dapat dikatakan baik, karena berdasarkan analisis, setiap tahunnya dinas terkait mampu melakukan efisiensi anggaran. Putri (2021) melakukan analisis terhadap kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Hasilnya menunjukkan bahwa dinas terkait termasuk kategori mandiri, namun kurang efektif dalam memenuhi anggaran setiap tahunnya. Terkait dengan penilaian kinerja berdasarkan rasio efisiensi, peneliti tidak dapat mendefinisikannya, karena biaya yang dikeluarkan bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, melainkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Monika & Bustari (2020) melakukan analisis kinerja keuangan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok. Hasil analisis menunjukkan bahwa varians pendapatan belum baik sedangkan untuk kinerja belanja cukup baik. Pertumbuhan aset, ekuitas, dan pendapatan, masing-masing mengalami peningkatan yang

© 2023 Penina Agnesia Bili, Susi Siswati.

cukup baik diiringi dengan realisasi belanja yang juga meningkat. Sedangkan, derajat desentralisasi pada SKPD ini perlu perhatian khusus, karena angka yang sangat rendah. Dalam hal efektifitas dan efisiensi pendapatannya menunjukan kurang efektif dan tidak efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Disdikpora DIY). Berdasarkan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta No. 41 tahun 2008, Disdikpora memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, kewenangan dekonsentrasi, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Analisis kinerja dilakukan untuk tahun anggaran 2017 hingga 2022. Berdasarkan LRA tahun 2017 hingga 2022, serapan anggaran belum maksimal, namun realisasi pendapatan lebih kecil dibandingkan realisasi belanja. Untuk itu, pada penelitian ini penulis menggunakan analisis varians pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, dan analisis keserasian belanja. Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) sebagai kritik terhadap adanya unsur individualis dan kelalaian *agent* yang memunculkan masalah keagenan. Teori ini merupakan alternatif atau perluasan dari teori *agency* yang sebelumnya dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Sama seperti teori *agency*, teori *stewardship* juga mengidentifikasi adanya bentuk keagenan dalam suatu entitas. Namun, teori *stewardship* mengasumsikan bahwa manajer mengambil peran sebagai *steward* yang akan bertindak untuk kesejahteraan *principal* (Keay, 2017).

Teori *stewardship* berakar pada ilmu psikologi dan sosiologi (Van Puyvelde *et al*., 2012). Menurut teori ini, *steward* tidak menjadikan kepentingannya sebagai tujuan utama. *Steward* dipandang sebagai pihak yang dapat dipercaya, menghayati nilai-nilai organisasi, fokus pada tujuan kolektif, dan mengutamakan kepentingan yang lebih luas (Schillemans & Bjurstrøm, 2020).

Dalam konstruksi hubungan masyarakat dengan pemerintah, masyarakat bertindak sebagai *principal*, yakni pihak yang memberi sumberdaya dan kewenangan kepada pemerintah sebagai *steward* untuk mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Jika direlevansikan ke penelitian ini, masyarakat sebagai *principal* memberi mandat dan kewenangan kepada *principal*, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai representasi pemerintah untuk mengelola sumber-sumber daya yang ada, melakukan pengambilan keputusan, dan menjalankan berbagai tindakan strategis untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kemajuan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. *Principal* diharapkan untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik, termasuk dalam hal kinerja keuangan, sehingga terhindar dari masalah keagenan, yaitu ketidakselarasan tujuan *agent* dan *principal*. Untuk itu, pengukuran kinerja menjadi media yang tepat dalam menilai dan mengevaluasi kinerja *principal*.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional pemerintah daerah. Menurut PP No. 71 tahun 2010, laporan keuangan daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib untuk

© 2023 Penina Agnesia Bili, Susi Siswati.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan daerah merupakan proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. LKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan derajat ketercapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah selama satu periode anggaran (Marselina *et al.*, 2023). Pengukuran kinerja keuangan daerah penting dilakukan, sebab pengukuran dan analisis kinerja keuangan daerah dapat memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Siregar & Mariana, 2020) dan menjadi peringatan dini terhadap kondisi keuangan daerah (Indriani *et al.*, 2020). Menurut Widianti *et al.* (2022), pengukuran kinerja keuangan organisasi sektor publik memberi beberapa manfaat, antara lain: (1) Mengidentifikasi atau mengetahui ketercapaian keinginan masyarakat, (2) Membantu organisasi memahami lebih dalam proses yang selama ini dilakukan, (3) Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan mengacu pada data dan fakta, (4) Mengetahui dan merancang langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan, (5) Menilai apakah perbaikan telah benar-benar dilakukan, dan (6) Mengungkapkan permasalahan yang belum diketahui. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan, yaitu berupa rasio keuangan (Tumija & Sinta, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi, yakni LRA Disdikpora DIY. LRA yang digunakan adalah LRA periode 2017-2021. Analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis rasio keuangan, yang mencakup: (1) Analisis varians pendapatan, (2) Rasio Pertumbuhan Pendapatan, (3) Analisis varians belanja, (4) Rasio Pertumbuhan Belanja, dan (5) Rasio Keserasian Belanja. Rasio Keserasian Belanja terdiri atas Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Gambar 1
Model Penelitian

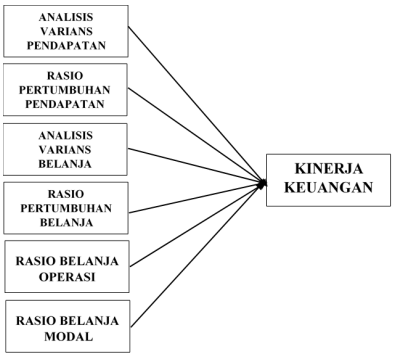

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan pendapatan yang dianggarkan. Jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dapat dikatakan bahwa satuan kerja memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja keuangan pendapatan daerah dinilai kurang baik (Mahmudi, 2010).

Hasil perhitungan varians pendapatan Disdikpora DIY disajikan pada tabel berikut:

© 2023 Penina Agnesia Bili, Susi Siswati.

Tabel 1
Varians Pendapatan Disdikpora DIY

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Varians	Kriteria
2017	3.102.289.584,00	2.860.485.000,00	241.804.584,00	Baik
2018	4.686.459.550,00	3.414.733.722,00	1.271.725.828,00	Baik
2019	5.105.401.742,00	4.172.172.275,00	933.229.467,00	Baik
2020	2.456.735.617,00	2.179.535.102,00	277.200.515,00	Baik
2021	3.584.124.414,00	3.329.079.000,00	255.045.414,00	Baik
Rata-rata	3.787.002.181	3.191.201.020	595.801.161,60	Baik

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan varians pendapatan yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga 2021, varians (selisih) pendapatan Disdikpora DIY selalu bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan selalu melampaui pendapatan yang dianggarkan. Adapun rata-rata varians pendapatan Disdikpora DIY adalah sebesar Rp 595.801.161,60. Nilai tersebut tergolong dalam kriteria Baik, artinya Disdikpora DIY efektif dalam melakukan penganggaran pendapatan dan dalam upaya untuk memenuhinya.

2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan *(income growth ratio)* adalah ukuran seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan ketercapaian pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan pendapatan diperoleh dengan memperbandingkan pendapatan periode terkait dengan pendapatan pada periode sebelumnya.

Tabel 2
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Disdikpora DIY

Tahun	Realisasi Pendapatan	RPP	Kriteria
2016	3.338.198.435,00	-	-
2017	3.102.289.584,00	-7,07%	Sangat Buruk
2018	4.686.459.550,00	51,06%	Sangat Baik
2019	5.105.401.742,00	8,94%	Sangat Baik
2020	2.456.735.617,00	-51,88%	Sangat Buruk
2021	3.584.124.414,00	45,89%	Sangat Baik
Rata-rata	3.712.201.557,00	9,39%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Disdikpora DIY yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa realisasi pendapatan sejak tahun 2016 hingga 2021 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2020, rasio pertumbuhan pendapatan bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa pendapatan pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan pada tahun sebelumnya. Namun, secara rata-rata, rasio pertumbuhan pendapatan Disdikpora DIY adalah 9,39%. Nilai ini tergolong dalam kriteria sangat baik, sebab rata-rata pertumbuhannya bernilai positif dan hampir menyentuh angka 10%.

3. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan. Jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dapat dikatakan bahwa satuan kerja memiliki kinerja pengelolaan belanja yang buruk. Hal ini disebut sebagai *unfavorable variance*, sedangkan jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja pengelolaan belanja satuan kerja dinilai baik. Hal ini disebut sebagai *favorable variance*.

Tabel 3
Varian Belanja Disdikpora DIY

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Varians	Kriteria
2017	1.228.081.180.520,00	1.325.611.569.624,36	97.530.389.104,36	*Favorable*
2018	1.260.189.423.185,00	1.327.372.081.501,00	67.182.658.316,00	*Favorable*
2019	1.272.820.910.035,00	1.377.200.694.422,00	104.379.784.387,00	*Favorable*
2020	1.073.935.142.133,00	1.227.433.266.212,00	153.498.124.079,00	*Favorable*
2021	1.831.956.017.251,25	1.981.006.857.742,00	149.050.840.490,75	*Favorable*
Rata-rata	1.333.396.534.624,85	1.447.724.893.900,27	114.328.359.275,42	*Favorable*

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan varians belanja yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga 2021, varians (selisih) belanja Disdikpora DIY selalu bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi belanja selalu kurang dari biaya yang dianggarkan. Maka, seluruh varians termasuk dalam kategori *favorable variance.* Adapun rata-rata varians belanja Disdikpora DIY adalah sebesar Rp 114.328.359.275,42. Nilai tersebut tergolong dalam kriteria *favorable*, artinya Disdikpora DIY efektif dalam

© 2023 Penina Agnesia Bili, Susi Siswati.

mengelola belanjanya.

4. Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan belanja merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola stabilitas belanjanya dari tahun ke tahun. Pada umumnya, besaran belanja cenderung meningkat dari waktu ke waktu karena berbagai alasan, misalnya inflasi, perubahan kurs, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian terhadap faktor makro ekonomi. Namun, pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang. Apabila pertumbuhan belanja dan pendapatan tidak seimbang dalam jangka menengah, akan mengganggu kesehatan fiskal. Rasio pertumbuhan belanja diperoleh dengan memperbandingkan belanja periode terkait dengan belanja pada periode sebelumnya.

Tabel 4
Rasio Pertumbuhan Belanja Disdikpora DIY

Tahun	Realisasi Pendapatan	RPB	Kriteria
2016	331.932.632.989,00	-	-
2017	1.228.081.180.520,00	269,98%	Naik
2018	1.260.189.423.185,00	2,61%	Naik
2019	1.272.820.910.035,00	1,00%	Naik
2020	1.073.935.142.133,00	(15,62%)	Turun
2021	1.831.956.017.251,25	70,58%	Naik
Rata-rata	1.166.485.884.352,21	65,71%	Naik

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa realisasi belanja sejak tahun 2016 hingga 2021 didominasi peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 269,98%. Namun, pada tahun 2020 rasio pertumbuhan belanja mengalami penurunan. Secara rata-rata, rasio pertumbuhan belanja Disdikpora DIY adalah 65,71%. Nilai ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan belanja Disdikpora DIY cenderung signifikan.

5. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja dilakukan dengan melihat rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja satuan kerja. Rasio-rasio ini menunjukkan proporsi masing-masing jenis belanja terhadap total belanja satuan kerja. Analisis keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas satuan kerja dalam memprioritaskan alokasi dananya.

5.1 Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan rasio yang menunjukkan proporsi belanja operasi dalam total belanja satuan kerja. Semakin tinggi Rasio Belanja Operasi, semakin tinggi pula total belanja satuan kerja yang dialokasikan untuk belanja operasi. Umumnya, belanja operasi mendominasi belanja satuan kerja, yaitu sekitar 60%-90%.

Tabel 5
Rasio Belanja Operasi Disdikpora DIY

Tahun	Realisasi BelanjaOperasi	Total Belanja Satuan Kerja	RBO	Kriteria
2017	1.054.433.186.101,00	1.228.081.180.520,00	85,86%	Sangat serasi
2018	1.099.178.608.332,00	1.260.189.423.185,00	87,22%	Sangat serasi
2019	1.136.133.792.320,00	1.272.820.910.035,00	89,26%	Sangat serasi
2020	976.682.478.850,00	1.073.935.142.133,00	90,94%	Sangat serasi
2021	1.711.149.054.914,25	1.831.956.017.251,25	93,41%	Sangat serasi
Rata-rata	1.195.515.424.103,45	1.333.396.534.624,85	89,34%	Sangat serasi

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa Rasio Belanja Operasi Disdikpora DIY cukup berfluktuasi, namun konsisten pada kisaran di atas 80%. Rata-rata Rasio Belanja Operasi untuk periode 2017 hingga 2021 adalah 89,34%. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja operasi merupakan aspek belanja yang mendominasi di Disdikpora DIY dan masuk dalam kategori "sangat serasi" karena berada di tingkat kriteria antara 81-100%. Besaran Rasio Belanja Operasi perlu menjadi perhatian satuan kerja, sebab belanja operasi bersifat jangka pendek, karena manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu periode (Siregar & Mariana, 2020).

5.2 Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan rasio yang menunjukkan proporsi belanja modal dalam total belanja satuan kerja. Belanja

modal akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Selain itu, belanja modal tidak rutin dilakukan. Belanja modal akan mempengaruhi neraca, yaitu menambah aset. Kebalikan dengan belanja operasi, pemerintah daerah yang tingkat pendapatan daerahnya masih tergolong rendah pada umumnya justru memiliki proporsi belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Umumnya, proporsi belanja modal berkisar 5%-20%.

Tabel 6
Rasio Belanja Modal Disdikpora DIY

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Satuan Kerja	RBM	Kriteria
2017	173.647.994.419,00	1.228.081.180.520,00	14,13%	Tidak serasi
2018	161.010.814.853,00	1.260.189.423.185,00	12,77%	Tidak serasi
2019	136.687.117.715,00	1.272.820.910.035,00	10,73%	Tidak serasi
2020	97.252.663.283,00	1.073.935.142.133,00	9,05%	Tidak serasi
2021	120.806.962.337,00	1.831.956.017.251,25	6,69%	Tidak serasi
Rata-rata	137.881.110.521,40	1.333.396.534.624,85	10,67%	Tidak serasi

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Belanja Modal yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa Rasio Belanja Modal Disdikpora DIY mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata Rasio Belanja Modal sebesar 10,67%, hal ini menunjukkan bahwa nilai persentase tersebut tergolong dalam kriteria yang "tidak serasi" karena berada ditingkat kriteria antara 0-20%.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa varians pendapatan Disdikpora DIY dapat dikatakan baik, karena selama tahun 2017-2021 realisasi pendapatan selalu melampaui anggaran pendapatan. Hal ini juga selaras dengan rasio pendapatan yang secara rata-rata masuk dalam kategori sangat baik. Varians belanja Disdikpora DIY masuk dalam kategori *favorable*, sebab realisasi belanja selalu lebih rendah dari anggaran belanja. Hal tersebut juga selaras dengan rasio pertumbuhan belanja yang secara rata-rata mengindikasikan peningkatan. Dalam hal rasio keserasian, terlihat bahwa rasio belanja operasi lebih tinggi dibandingkan rasio belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja operasi menjadi pos belanja yang mendominasi total belanja Disdikpora DIY.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Disdikpora DIY cukup baik dalam mengelola anggarannya. Hal ini diharapkan dapat terus dilanjutkan. Namun, belanja operasi perlu diperhatikan secara khusus agar persentasenya dapat terus terjaga, sehingga tidak mengganggu keseimbangan fiskal.

REFERENSI

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, *16*(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2020). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Di Kalimantan. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, *4*(2), 175. https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7675

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*, 305–360. https://doi.org/10.1177/0018726718812602

Keay, A. (2017). Stewardship Theory: Is Board Accountability Necessary? *International Journal of Law and Management*, *59*(6), 1292–1314. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118

Marselina, D., Soselia, K. E., Ningrum, C. S.,

Pangestu, N. F., Lero, A. F., & Kristanti, P. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *19*(1), 1. https://doi.org/10.21460/jrak.2023.191.438

Monika, L., & Bustari, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Solok. *Pareso Journal*, *2*(1), 98–111.

Patih, S., Indika, M., & Talia, I. (2022). Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *17*(1), 64–76. https://doi.org/10.37301/jkaa.v17i1.62

Putri, R. L. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, *2*(1), 1. https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i1.1640

Schillemans, T., & Bjurstrøm, K. H. (2020). Trust and Verification: Balancing Agency and Stewardship Theory in the Governance of Agencies. *International Public Management Journal*, *23*(5), 650–676. https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807

Siregar, A. O. D., & Mariana, I. S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE*, *9*(1), 1–19.

Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, *18*(2), 63–78.

Tumija, T., & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, *9*(2), 61–78. www.djpk.kemenkeu.go.id

Van Puyvelde, S., Caers, R., du Bois, C., & Jegers, M. (2012). The Governance of Nonprofit Organizations: Integrating Agency Theory With Stakeholder and Stewardship Theories. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, *41*(3), 431–451. https://doi.org/10.1177/0899764011409757

Widianti, I. G. A., Fitriyah, N., & S, A. B. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pemerintah Daerah Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kota Mataram. *Aktiva : Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, *7*(1), 1–13. https://doi.org/10.53712/aktiva.v7i1.1464

© 2023 Penina Agnesia Bili, Susi Siswati.